

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi semakin meningkat, penambahan penduduk mendorong manusia untuk semakin berjuang dalam mencari uang dari hasil kerja keras. Namun, jika hasil kerja keras tersebut masih dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka koperasi dianggap sebagai perusahaan yang dapat membantu dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kurang. Ada tiga sektor ekonomi yang menangani berbagai kegiatan usaha dalam kehidupan ekonomi, yaitu sektor negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, ketiga sektor ekonomi tersebut harus saling berhubungan dan bekerjasama secara baik dan teratur. Dalam melaksanakan perekonomian tersebut, koperasi menjadi pilihan yang sesuai.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi dan merupakan bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Selain itu, tujuan koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara umum, serta turut berperan dalam membangun perekonomian nasional untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis koperasi, seperti koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, koperasi produksi, dan koperasi kredit/simpan pinjam. Di antara jenis-jenis koperasi ini, koperasi kredit/simpan pinjam yang berbentuk Credit Union (CU) sangat populer dan diminati oleh masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kembali mempercayai koperasi sebagai lembaga keuangan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kelembagaan koperasi.

Sebuah Credit Union adalah institusi keuangan yang meminjamkan uang mereka kepada anggota, yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa lembaga CU sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha keuangan, CU bertanggung jawab melayani banyak masyarakat, sehingga diperlukan usaha yang maksimal dari CU agar masyarakat yang menggunakan jasa CU merasa puas. CU memberikan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan semakin besar jumlah uang yang disalurkan oleh CU kepada masyarakat, semakin besar juga kepercayaan masyarakat pada CU.

Salah satu pilihan bagi para nasabah untuk mengakses pinjaman adalah melalui lembaga keuangan mikro atau koperasi. Credit Union (CU) merupakan salah satu koperasi yang fokus pada pemberian pinjaman, yang didirikan oleh anggota dan untuk kepentingan anggota. Model koperasi CU ini tumbuh dan berkembang dari inisiatif masyarakat (bottom-up) dengan tujuan utama untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu contoh CU di Indonesia adalah CU Merdeka, yang saat ini memiliki 13 unit di beberapa desa di Kabupaten Karo. Kredit yang diberikan dapat digunakan untuk modal usaha, pertanian, dan kesejahteraan.

Credit Union memiliki tujuan beragam yang ingin dicapai, termasuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan lingkungan kerja. Sebagai koperasi simpan pinjam, Credit Union bertindak untuk menciptakan sumber kredit bagi anggotanya dengan bunga yang adil, serta mendorong pengelolaan uang yang bijaksana dan terencana.

Semua tujuan tersebut merupakan gabungan yang harus diperjuangkan untuk dicapai secara keseluruhan. Sebagai sebuah proses yang kompleks, perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. kepada pelanggan yang meminta pinjaman kredit dan yakin bahwa pelanggannya mampu untuk membayar kembali kredit yang dia terima.

Oleh karena itu, pengelolaan kredit yang baik dalam bentuk kebijakan kredit yang mencakup pengendalian intern diperlukan agar dana dari nasabah dapat

tertagih tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Tujuan pengendalian intern kredit bagi CU adalah menjaga keamanan kredit yang disalurkan, mengetahui apakah kredit lancar atau tidak, serta mencegah dan menyelesaikan kredit macet atau bermasalah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran kredit dalam mendapatkan pendapatan yang besar bagi CU, namun juga menunjukkan kompleksitas risiko yang harus dihadapi, sehingga CU perlu memiliki sistem pengendalian intern dalam proses penyaluran kredit.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah termasuk kebijakan kredit yang terlalu longgar, pelanggaran prosedur kredit, niat buruk dari pemilik, manajer, atau karyawan bank, dan kelemahan dalam sistem informasi kredit bermasalah. Sementara faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah termasuk kegagalan usaha debitur, penyalahgunaan persaingan yang tidak sehat oleh debitur, serta penurunan aktivitas ekonomi dan suku bunga kredit yang tinggi.

Sistem internal kontrol kredit mikro melibatkan struktur organisasi, metode, dan ukuran yang disusun secara terpadu untuk menjaga aset perusahaan, memastikan ketepatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian internal tidak bertujuan untuk menghilangkan sepenuhnya kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam proses pemberian kredit usaha, tapi bagaimana cara menjaga agar proses pemberian kredit dapat dihindari dari pemborosan waktu, tenaga, dan dana serta tidak terlalu tergantung pada jumlah tahapan yang berbeda.

Pengendalian intern adalah sistem, proses, atau struktur yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain dalam sebuah perusahaan, dengan tujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pengendalian melalui efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Rkk., 2020). Definisi pengendalian intern ini menekankan pada tujuan yang ingin dicapai, bukan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Pengendalian intern yang memadai terhadap permohonan kredit calon nasabah dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktek penyaluran kredit yang tidak baik.

Diperlukan pengendalian intern karena dapat mendukung efektivitas pemberian kredit. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit, ini menunjukkan sikap hati-hati dalam koperasi tersebut. Agar dapat berperan sebagai badan usaha yang kuat dan mandiri, koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus dapat meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha mengurangi risiko kegagalan kredit sebaik mungkin, terutama akibat lemahnya pengendalian intern. Pengendalian intern yang baik berasal dari struktur terkoordinasi yang membantu pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, dan melindungi harta perusahaan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan atau objektif tertentu. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit bermasalah atau buruk termasuk faktor internal dan eksternal dari institusi keuangan tersebut.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit bermasalah atau buruk termasuk faktor internal dan eksternal dari institusi keuangan tersebut. Faktor internal yang menyebabkan kredit macet adalah kebijakan perkreditan yang ekspansif, pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, ketidakbaikan niat dari pemilik, pengurus, atau pegawai koperasi, dan kelemahan dalam sistem informasi kredit macet. Sementara itu, faktor eksternal yang memicu kredit macet adalah kegagalan usaha. Debitur, penyalahgunaan persaingan tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya aktivitas ekonomi dan suku bunga kredit yang tinggi adalah masalah yang dihadapi koperasi. Contohnya, nasabah penerima pembiayaan mengalami bencana seperti kematian, serangan hama penyakit, banjir, dan kebangkrutan usaha. Faktor internal juga menjadi masalah, terutama dalam hal analisis yang tidak menyeluruh dan kredit bermasalah. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian kredit sangat diperlukan agar koperasi dapat menghindari risiko kredit bermasalah. Masalah juga terjadi pada sistem pengendalian intern kredit makro, terutama dalam hal aktivitas pengendalian.

Jika ini tidak ditangani dengan baik, akan menambah jumlah kredit macet yang merugikan perusahaan. Masalah intern kredit mikro di Credit Union (CU) Merdeka Berastagi Kabupaten Karo sangat perlu diperhatikan.

Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Kredit Macet Koperasi CU Merdeka Berastagi Kabupaten Karo**  
**Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pinjaman	Jumlah Tunggakan	Kredit Macet
1	2019	14.980	33.485.920.456	3.010.350.550	8,98 %
2	2020	13.769	31.194.589.680	2.630.724.242	8,43%
3	2021	14.301	30.797.456.486	2.818.595.789	9,15%
4	2022	13.691	30.395.483.876	2.804.369.685	9,22%
5	2023	13.437	29.411.738.836	3.100.012.661	10,54%

**Sumber : Koperasi CU Merdeka Berastagi Kabupaten Karo**

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa fenomena kredit macet pada koperasi CU Merdeka dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi jumlah rupiah yang ditunggak, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Nilai kredit macet dari sisi presentase besarnya justru meningkat secara konsisten, dari nilai 9.15% pada tahun 2022 hingga 2023. Pertumbuhan kredit macet ini akhirnya menjadi masalah yang dihadapi oleh koperasi kredit CU Merdeka setiap tahunnya.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari karyawan CU Merdeka, fenomena lain yang disebutkan adalah bahwa pengawasan terhadap prosedur pemberian kredit di koperasi masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian dokumen pada pengawasan yang dilampirkan oleh calon nasabah dalam pelaksanaan otorisasi. Ketidakcocokan otorisasi ini terjadi ketika tanda tangan calon nasabah pada surat bukti kredit tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dari penjelasan di atas, penulis merasa tertarik dengan hal tersebut. Alasan penulis memilih judul tersebut karena tertarik pada dunia perkreditan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam judul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Kredit Mikro Pada Koperasi Credit Union (CU) Merdeka Berastagi Kabupaten Karo".

### 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan sbb:

1. Selama periode 2022 hingga 2023, Koperasi Credit Union (CU) Merdeka mengalami peningkatan dalam pemberian kredit macat.
2. Dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah tidak sesuai dengan data yang diajukan.
3. Dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah pada surat bukti kredit tidak sesuai.

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah analisis sistem pengendalian intern kredit mikro pada koperasi Credit Union (CU) Merdeka Berastagi Kabupaten Karo.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kredit macat pada koperasi Credit Union (CU) Merdeka Berastagi Kabupaten Karo?
2. Bagaimana sistem pengendalian intern kredit makro pada koperasi Credit Union (CU) Merdeka Berastagi Kabupaten Karo?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapaun tujuan peneliti ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kredit macet pada koperasi Credit Union (CU) Merdeka Berastagi Kabupaten Karo
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern kredit mikro pada koperasi Credit Union (CU) Merdeka Berastagi Kabupaten Karo

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dan untuk membandingkan dalam teori yang diterima selama perkuliahan pada fakultas sosial dan Hukum Universitas Quality Berastagi dengan kondisi tempat penelitian
2. Bagi CU Merdeka, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan strategi untuk menentukan kebijakan khususnya terkait dengan meningkatkan realisasi pemberian kredit dan mengurangi kredit macet bahkan mencegah adanya penunggakan
3. Bagi Penulis selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagaibahan perbandingan dan referensi untuk penulis yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern kredit Mikro pada CU Merdeka Berastagi dan memberikan informasi bagi dunia pengetahuan dan menambah wawasan tentang Lembaga keuangan mikro koperasi kredit (CU) untuk penelitian selanjutnya.